LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021
BULAN MARET DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Rabu, 7 April 2021

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Para Kepala Bidang
2. Para Kepala Sub Bagian
3. Para Kepala Seksi
4. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
5. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Verifikator Anggaran di lingkungan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

D. Notulis

Pelaksana Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 21,56 %

b.Keuangan = 3.563.688.196 (17,30%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	73.531.000			54.702.400		
1	Rakor Keterpaduan Program	73.531.000	74,39	50,59	54.702.400	(23,80)	
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	9.000.000			9.000.000		
1	Rakor Evaluasi	9.000.000	100	47,62	9.000.000	(52,38)	
Administrasi Keuangan							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.127.359.000			1.014.968.377		
1	Tambahan Penghasilan Pegawai	4.127.359.000	24,90	21,42	1.014.968.377	(3,48)	
Administrasi Umum							

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.080.000			0		
1	Benda Pos dan Surat Menyurat	2.080.000	50	30	0	(20)	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.801.000			6.397.000		
1	Belanja surat kabar	300.000	30	16,66	100.000	(13,34)	
2	Kesekretariatan	19.501.000	32,30	22,90	6.297.000	(9,40)	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.710.000			1.400.000		
1	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10.710.000	16,40	8,83	1.400.000	(7,57)	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	14.500.000			0		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.500.000	17,64	0	0	(17,64)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi							
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	547.018.000			6.065.000		
1	Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Perempuan Potensial dalam Proses Pengambilan Keputusan	547.018.000	27,53	22,01	6.065.000	(5,53)	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.900.000			900.000		
1	Rapat Pengawasan Penanganan Kasus PPT Provinsi Jawa Tengah	3.900.000	46,15	18,75	900.000	(27,40)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	10.210.000			4.780.000		
1	Identifikasi, Koordinasi dan Penjangkauan Kelompok Keluarga Rentan	10.210.000	77,18	31,25	4.780.000	(45,93)	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	10.390.000			0		
1	Pelatihan Pencegahan Kekerasan di Sekolah melalui Disiplin Positif	10.390.000	100	26,99	0	(73,01)	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi							
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	196.579.000			44.460.000		
1	Penyediaan Layanan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak	196.579.000	38,17	22,28	44.460.000	(15,89)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera							
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	59.937.000			24.387.000		
1	Orientasi Kader Kelompok UPPKS	59.937.000	50	24,21	24.387.000	(25,79)	karena surat edaran Sekretaris Daerah nomor 900/0067 tentang penyelenggaraan kegiatan secara daring dan penundaan jasa konsultasi tahun anggaran 2021

							sehingga rekening fullboard dan uang harian peserta tidak bisa diguanakan dalam kegiatan (sehingga belum bisa terserap)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE							
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal							
	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.481.379.000			198.795.000		
1	Pelayanan KB MKJP	1.481.379.000	11,99	7,12	198.795.000	(4,87)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat							
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi							
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	238.917.000			14.635.000		
1	Penyusunan dokumen profil perempuan, profil anak, isu perempuan, isu anak dan analisis kekerasan	206.120.000	9,93	9,89	13.470.000	(0,04)	
2	Media KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender, pemenuhan hak anak serta pencegahan kekerasan thd perempuan dan anak	11.842.000	35,81	15,34	640.000	(20,46)	
3	Pengembangan aplikasi E-kekerasan	20.955.000	2,51	0,75	525.000	(1,76)	

Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	18	0	0			

Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	21	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

Adanya Defiasi negatif dari kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik,
3. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan,
4. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor,
5. Penyediaan makanan dan minuman,
6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Defiasi tersebut dikarenakan Penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan OPD. sedangkan untuk kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, defiasi dikarenakan masa pandemi sehingga tidak memungkinkan untuk penyerapan anggaran secara efektif, mengingat adanya PPKM sehingga mobilitas serba terbatas.

Upaya

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, apabila kondisi sudah memungkinkan, sehingga dapat memaksimalkan penyerapan anggaran.

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

Rencana Kegiatan di Bulan April sebagai berikut:

Sekretariat

1. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
2. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi.
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
5. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
6. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
4. Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

1. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat.
2. Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja.
3. Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan KIE

1. Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2. Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja

Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi.
3. Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi.
4. Penyusunan Profil Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

V. PENUTUP

Kesimpulan rapat koordinasi pengendalian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2021 diminta para Kabid/ Kasi/Kasubbag agar mencermati e-RKO sesuai Kertas Kerja masing-masing dan DPA masing-masing, serta pelaksanaan kegiatan waktu nya jangan di akhir bulan.
2. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, PPKom agar berkoordinasi dengan pejabat pengadaan barang/jasa guna kelancaran pelaksanaannya (kontrak konsolidasi ATK masih proses).
3. PPTK setiap selesai melakukan kegiatan segera mempertanggungjawabkan (SPJ), kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, paling lama 15 hari kerja setelah uang muka kerja/panjer diterima dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada PA/KPA.

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Maret 2021, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Rabu 7 April 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PERREMPUAN, PERLIDNUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELAURAGA BERENCANA

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM
NIP. 196811241993102001